

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Oleh karena itu maka pelayanan kesehatan wajib diselenggarakan oleh pemerintah guna menjaga kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya maka diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 3 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Berdasarkan Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) tersebut kemudian pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Selanjutnya pada tahun 2011 Pemerintah

membentuk Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan setelah itu pada tahun 2014 dibentuklah BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

Semua warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Program jaminan sosial pada dasarnya adalah sebuah program untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pendekatan sistem, dimana negara dan masyarakat secara bersama-sama ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraanya.

Berdasarkan tujuan pendiri bangsa dan sesuai Undang - Undang maka Pemerintah dalam hal Departemen Kesehatan telah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, mendekati miskin dan tidak mampu. Pemerintah merancang program BPJS sejak tahun 2011 namun penyelenggaraan jaminan sosial untuk masyarakat mulai dilaksanakan, khusus untuk BPJS Kesehatan diimplementasi pada 1 Januari 2014 untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam kerangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Pada hakekatnya penjaminan masyarakat miskin akan menjadi tanggung jawab pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan demikian melalui program BPJS Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan umur harapan hidup bangsa, menurunkan angka kematian ibu

melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran dan terlayannya masalah kesehatan lainnya. Realita pelaksana pelayanan BPJS Kesehatan tergambar jelas dengan adanya dampak bagi pengguna BPJS Kesehatan. Dengan adanya program BPJS Kesehatan terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, proses pelayanan yang sudah merata dibandingkan dengan sebelum adanya program, hal ini dilihat dari meningkatnya pengunjung yang datang ke Puskesmas. Selain itu juga jumlah kematian dan penyakit yang dialami mengalami perubahan yang signifikan. Program ini telah banyak memberikan perubahan-perubahan, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan, baik dalam pelayanan kesehatan maupun dalam proses verifikasi peserta. Untuk itu pemerintah menerapkannya keseluruh pelosok masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.

Visi dan misi Kecamatan Adonara Barat adalah untuk memberikan proteksi kesehatan melalui program Pelayanan dasar gratis di Puskesmas. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Kecamatan Adonara Barat yang sehat dan sejahtera. Untuk itu maka keseluruhan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Adonara Barat haruslah mampu memberi dampak positif bagi masyarakatnya, baik dari sisi keperhatiannya maupun materialnya seperti adanya jaminan keadilan dan keamanan dalam kehidupan masyarakatnya, adanya penghormatan yang hakiki dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar sebagai hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak mendapatkan pelayanan

kesehatan dasar. Dengan demikian, maka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berjalan sebagaimana diharapkan dengan dukungan partisipasi masyarakat secara luas sebagai lokomotif dalam pembangunan di Indonesia Khususnya Kecamatan Adonara Barat.

Pemerintah Flores Timur menjalankan Program BPJS Kesehatan sejak tahun 2014. Program jaminan kesehatan daerah memberi perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu dan iurannya dibayar oleh pemerintahan agar kebutuhan dasar kesesehatan dapat dipenuhi. Kemampuan dinas/petugas kesehatan terukur ketika melakukan upaya-upaya koordinasi dengan anggota penerima program tersebut, sesuai dengan kebijakan yang berpengaruh pada hasil atau kebijakan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan pada masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Flores timur, diberlakukan pada 21 Puskesmas dan Rumah Sakit yang tersebar di 19 Kecamatan. Beberapa diantaranya telah memberikan pelayanan rawat inap, salah satunya Puskesmas Waiwadan. Sementara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis khususnya masyarakat miskin persyaratan yang harus dibawah yaitu kartu BPJS Kesehatan.

Kegiatan pelaksanaan program kesehatan gratis di Puskesmas Waiwadan belumsepenuhnya diketahui oleh masyarakat bahwa adanya program dan prosedur kesehatan gratis. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang berkunjung di Puskesmas dengan tidak membawa Kartu Jaminan Kesehatan

apapun khususnya kartu BPJS Kesehatan, sehingga harus dikenakan biaya administrasi dan biaya obat yang dibutuhkan. Jika persoalan ini tidak ditangani secara serius oleh pihak puskesmas maka ini dapat menghambat bahkan menggagalkan program BPJS Kesehatan.

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur tersebut maka perlu dilakukan suatu evaluasi agar dapat mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di tengah-tengah masyarakat. Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. Evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan. Oleh karena itu evaluasi program dapat disimpulkan sebagai suatu proses pencarian informasi, penemuan informasi dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektifitas dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan, (Cross dalam Munthe, 2017:217).

Sehubungan dengan pengertian evaluasi program tersebut maka dalam penelitian ini, akan diteliti pelaksanaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka judul penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: **“Evaluasi Pelaksanaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang dirumuskan adalah; Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi (Evaluasi konteks dan evaluasi proses) Pelaksanaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi masukkan dalam teori-teori Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang evaluasi pelaksanaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- 3) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas dan menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu Administrasi publik juga dapat mengembangkan kemampuan daya berpikir penulis melalui karya ilmiah dan sebagai penerapan dari berbagai teori yang penulis dapatkan selama dalam perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandiri, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan ilmiah bagi peneliti yang berminat dalam penelitian yang berkaitan dengan topik ini.
- 2) Menjadi bahan acuan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam mengelola jasa pelayanan.